HUBUNGAN JEPANG DAN AMERIKA SERIKAT DI BIDANG PERTAHANAN PERIODE 2006-2014

Reysky Vinsent Ramazotty

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Komputer Indonesia, Jl Dipatiukur 114-116 Bandung

Email: reyramazotty@gmail.com

Abstract

This research's background is the relation of Japan as a country that is known as a strong economical state and has the advanced technology to the United States due to the inability of the Japanese to protect and safeguard its own sovereignty and defense. The study aims to identify factors that influence the overall relation between these country. The method used is qualitative method. Data were collected by interview and literature studies as well as the search website. The study was conducted at the Japanese Embassy in Jakarta and the Indonesian Institute of Sciences (LIPI). These results indicate internal and external factors that influence the dependence that occurs between Japan and the United States. So illustrated clearly why Japan until now could not be independent defense. Results showed Japan suffered a dilemma conclusion to rebuild they military strength or not, while the perceived threat from the region is very destabilizing Japan itself. For that situation the answer taken by the Japanese is to be an ally of the United States to maintain its security and do not violate the existing constitution.

Keywords: Dependence, Defense Japan, Japan-US Relations

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi hubungan antara Jepang sebagai negara yang dikenal sebagai negara yang kuat secara ekonomi dan memiliki teknologi yang maju dan Amerika Serikat dikarenakan ketidakmampuan Jepang untuk melindungi dan menjaga kedaulatan serta pertahanannya sendiri. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi hubungan tersebut secara menyeluruh. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Data dikumpulkan dengan melakukan wawancara dan studi literatur serta penelusuran *website*. Penelitian dilakukan di Kedutaan Besar Jepang di Jakarta dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Hasil penelitian ini menunjukan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi ketergantungan yang terjadi antara Jepang dengan Amerika Serikat. Sehingga tergambar dengan jelas mengapa Jepang sampai saat ini belum bisa mandiri secara pertahanan. Hasil kesimpulan menunjukan Jepang mengalami dilema untuk membangun kembali kekuatan militernya atau tidak, sedangkan ancaman yang dirasakan dari kawasan sangat mengganggu kestabilan Jepang sendiri. Untuk itu jalan yang ditempuh oleh Jepang adalah dengan menjadi sekutu Amerika serikat untuk dapat mempertahankan keamanannya dan tidak menyalahi konstitusi yang ada.

Kata Kunci : Ketergantungan, Pertahanan Jepang, Hubungan Jepang-Amerika

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Millenium ketiga ditandai dengan berbagai fenomena fundamental yang mengubah wacana politik, keamanan dan pertahanan. Fenomena itu adalah perkembangan teknologi, gelombang demokratisasi, interdependensi hubungan antar bangsa. Dengan globalisasi sebagai impuls utamanya, fenomena itu berarti telah mengubah gravitasi politik domestik negara-negara. Bersama dengan kompleksitas politik dalam negeri, semua itu mempengaruhi "keamanan nasional" (*national security*) suatu negara.

Jepang merupakan salah satu negara di Asia Timur yang terkenal dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, salah satu negara dengan perekonomian yang maju dan juga sebagai salah satu negara yang memiliki kemajuan di bidang industri. Beberapa kemajuan dan kelebihan yang dimiliki Jepang ternyata tidak menjadikannya sebagai negara yang bisa mandiri secara kekuatan militer, sedangkan situasi yang terjadi di kawasan Asia Timur sampai sekarang tidak dapat terlepas dari konflik yang masih berlangsung sampai sekarang ini. Terutama yang terjadi pada tahun 2006-2014 dimana dirasakan oleh Jepang ancaman yang timbul dari kawasan Asia Timur semakin meningkat. Khususnya dari China yang semakin memperkuat angkatan militernya dan juga selalu meningkatkan anggaran militernya secara terus menerus setiap tahunnya. Serta ancaman yang dirasakan dari Korea Utara yang memiliki persenjataan nuklir yang sangat mengancam Jepang dengan selalu melakukan uji coba peluncuran rudal-rudalnya yang telah mencapai batas negara Jepang.

Dalam dinamika studi hubungan internasional terdapat berbagai isu kontemporer yang pada awalnya lebih bersifat kepada hal yang teknis, yang kemudian berkembang menjadi agenda politik yang berimplikasi pada lahirnya pola-pola baru kerjasama internasional, dimana dalam perkembangan hubungan internasional terkini tidak lagi hanya memperhatikan aspek hubungan antara negara saja, yang hanya mencakup aspek politik, ekonomi, budaya serta aspek-aspek klasik lainnya, tetapi juga aspek lain seperti interdependensi ekonomi, hak asasi manusia, keamanan transnasional, organisasi internasional, rezim internasional dan juga masalah sengketa internasional (http://www.theglobal-review.com/ diakses pada tanggal 27 Mei 2015).

Secara historis terutama sebelum tahun 1945, Jepang adalah negara dengan militer yang sangat kuat, namun sejak berakhirnya Perang Dunia II (PD II) Jepang tidak memiliki kekuatan militer. Sejak saat itu, secara faktual pertahanan Jepang sepenuhnya tergantung pada Amerika Serikat. Ketergantungan tersebut menyebabkan dunia internasional mengkritik Jepang karena di satu sisi Jepang tidak memberikan cukup kontribusi terhadap penjagaan stabilitas dan keamanan internasional, namun di sisi lain Jepang menikmati dan mendapatkan berbagai keuntungan yaitu terjaminnya keamanan jalur-jalur perdagangannya di berbagai belahan dunia. Pada tahap tertentu dunia internasional bahkan menekan Jepang untuk membangun kembali kekuatan militernya. Sumbangan Jepang secara finansial dirasa tidak cukup dan tidak fair dalam upaya negara-negara untuk menjaga keamanan internasional.

Jepang dituntut berpartisipasi sepenuhnya baik secara finansial maupun militer.

Keadaan ini menyebabkan Jepang mengalami dilema antara membangun kekuatan militernya kembali atau tidak. Jika pilihan yang pertama dilakukan maka akan muncul tentangan domestik karena hal itu bertentangan dengan Konstitusi Jepang tahun 1947 yang melarang Jepang untuk membangun kekuatan militernya. Selain itu secara eksternal negara-negara tetangga Jepang juga menentang pembangunan kembali militer Jepang, karena adanya kekhawatiran akan bangkitnya militerisme Jepang yang ekspansif di mana mereka pernah menjadi korbannya. Sebaliknya jika pilihan kedua yang dilakukan maka Jepang akan mendapatkan tekanan yang semakin besar dari banyak negara yang menganggap Jepang adalah *free rider* dari keamanan internasional yang diupayakan dan dijaga oleh dunia internasional (Heri, 2010: 66).

Kementerian pertahanan Jepang menilai bahwa persoalan yang belum dapat terselesaikan di wilayah laut Asia Tenggara dan Asia Timur, akan memberi pengaruh bagi kepentingan nasional Jepang, dan Jepang sedang menggagas untuk menggalang dan kemudian membentuk kerja sama *security multilateral* dalam rangka mengamankan wilayah laut tersebut (https://oseafas.wordpress.com/2010/03/16/sistem-pertahanan-jepang-di-asia-tenggara/, diakses pada 15 Mei 2015)

Pasal 9 konstitusi 1947 Jepang, membatasi wewenang SDF (*Self Defence* Force) dengan hanya memiliki kekuatan minimum untuk keperluan mempertahankan diri. Sehingga berakibat keamanan dan *survival* Jepang sangat tergantung dari jaminan *security* AS, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam *"US-Japan Mutual Security Treaty"* (MST) yang ditandatangani tahun 1951 dan berlaku pada April 1952 (http://thesis.umy.ac.id/datapublik/t9664.pdf, diakses pada 5 Mei 2015).

Setelah kekalahan Jepang pada PD II, sesuai Deklarasi Potsdam dan Instruksi GHQ (*General Head Quarter*) tentara Amerika Serikat (AS) mewajibkan pemerintah Jepang untuk membatalkan semua tenaga militer. Instruksi ini menjadi pasal 9 UUD 1947. Maka Jepang memilih jalan sebagai negara berdasarkan pasifism. Tetapi, karena makin tingkatnya perang dingin antara pihak AS dan pihak USSR (*Union of Soviet Socialist Republics*), tentara AS mengubah kebijakan awalnya. AS menganggap Jepang sebagai *front-line* di Asia terhadap negara-negara sosialis (USSR dan *People Republic of China*). Waktu Perang Korea terjadi pada 1950, GHQ menyuruh pemerintah Jepang mendirikan satu unit bersenjata sebagai bagian khusus kepolisian (*Keisatsu-Yobitai*). Lalu, pada 1952 unit ini dipisah dari kepolisian dan menjadi pasukan mandiri, bernama *Hoantai* (*Security force*). Akhirnya pada 1954, *Security Force* menjadi *Jieitai* (Pasukan bela diri), dan ditanggung oleh *National Defence Agency*. Pasukan ini melengkapi pasukan darat, pasukan laut dan pasukan udara (http://www2.gsid.nagoya-u.ac.jp/blog/shimadayuzuru/files/2011/03/paper_for_lecture_at_unand_on20110225.pdf, diakses pada 12 Februari 2015).

Kebanyakan kalangan masyarakat Jepang memandang bahwa aliansi dengan Amerika Serikat masih bernilai penting, hal tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk kepentingan pertahanan Jepang, akan tetapi juga bagi perdamaian dan stabilitas regional dan internasional. Bertolak belakang dengan pandangan

sebelumnya, kritik serta tantangan-tantangan mengenai aliansi tersebut juga banyak bermunculan, terutama mengenai kecenderungan Jepang untuk semakin terlibat dalam strategi kepentingan Amerika Serikat, nilai signifikandan netralitas aliansi pasca Perang Dingin, ketimpangan hubungan timbal balik yang telah disepakati kedua negara dimana banyak kalangan yang menilai bahwa hubungan tersebut hanya menguntungkan Jepang, serta pertentangan elit politik Jepang mengenai sah atau tidaknya aliansi apabila melihat Konstitusi 1947 (Irsan, 2007: 88-89)

1.2 Rumusan Masalah

Melihat kondisi latar belakang diatas, dimana Jepang dirasa tidak mampu sendirian untuk mengatasi permasalahan kawasan yang dapat mengancam kedaulatan dan keamanan negaranya maka diperlukan menjalin hubungan dengan negara yang memiliki kekuatan besar seperti Amerika Serikat, dan juga sejauh mana kekuatan militer Jepang dapat memenuhi kebutuhan pertahanannya. Peneliti merumuskan permasalahan dalam bentuk pertanyaan **"**Bagaimana hubungan Jepang dan Amerika Serikat di bidang pertahanan?"

2. Kerangka Pemikiran

Agar adanya suatu batasan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan beberapa teori yang digunakan dan konsep yang berkaitan dengan objek penelitian, yang berguna dalam menganalisa masalah. Tujuannya adalah agar jalannya penelitian konsisten dari awal hingga akhir dan dapat mencapai tujuan penelitian sebagaimana telah digariskan pada latar belakang permasalahan yang ada.

Perwita & Yani menyatakan Studi tentang Hubungan Internasional banyak diartikan sebagai suatu studi tentang interaksi antar aktor yang melewati batas-batas negara. Terjadinya Hubungan Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar. Dalam penelitian yang akan dilakukan Jepang melakukan interaksi lintas batas negara dengan Amerika Serikat guna membantu mengamankan wilayah Jepang.

Hubungan Internasional yang terjadi antara Jepang dengan Amerika Serikat dikhususkan bagi Jepang sebagai sarana untuk mempertahankan kedaulatannya dari ancaman yang berasal dari negara-negara tetangganya.

Kerjasama internasional yang dilakukan Jepang dan Amerika Serikat merupakan salah satu dari cara Jepang untuk menjawab ketidakmampuan dalam mengimbangi ataupun memperkuat pertahanannya untuk menjaga keamanan dan pertahanan dari situasi di Asia Timur.

Dari segi keamanan internasional, Buzan membagi keamanan kedalam lima dimensi yaitu politik, militer, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dimana tiap dimensi keamanan tersebut mempunyai unit keamanan, nilai dan karakteristik kelangsungan hidup dan ancaman yang berbeda-beda. Dalam penelitian ini aspek ancaman keamanan Jepang berasal dari Nuklir yang terus dikembangkan oleh

Korea Utara, kemudian sengketa perbatasan wilayah dengan Tiongkok dan Rusia.

Ancaman-ancaman tersebut menjadi fokus utama Jepang untuk selalu menjaga kedaulatan wilayahnya dan meminimalkan segala aspek yang dapat merugikan keamanan Jepang.

Politik luar negeri merupakan suatu mekanisme interaksi negara-negara dengan beradaptasi dengan lingkungannya. Kondisi sebuah negara akan mempengaruhi politik luar negerinya. Negara yang memiliki lingkungan strategis pasti akan memiliki politik luar negeri yang berbeda, begitu juga dengan keadaan negara tujuan dimana politik luar negeri tersebut dilaksanakan, akan mempengaruhi perumusan politik luar negeri negara lain.

Negara-negara memiliki kepentingan bersama dalam membangun dan memelihara ketertiban nasional sehingga mereka dapat hidup berdampingan dan berinteraksi atas dasar stabilitas, kepastian dan dapat diramalkan. Untuk tujuan itu, negara-negara diharapkan menegakkan hukum internasional untuk menjaga komitmen perjanjian mereka dan mematuhi aturan, konvensi, dan kebiasaan tatanan hukum internasional.

Berdasarkan interaksi yang ada di dalam dan luar negeri Jepang diambil suatu kebijakan luar negeri Jepang yang berdasarkan Pakta Keamanan Jepang-AS yang kemudian membuat Jepang lebih memusatkan pada kebijakan *Seikei Buri*, dimana pemusatan pada masalah-masalah ekonomi dan menghindarkan diri dari keterlibatan dalam masalah politik dan keamanan.

Berdasarkan *The Vienna Convention on the Law of Treaties*, penjanjian internasional adalah perjanjian antara subjek-subjek hukum internasional yang menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban menurut hukum internasional. Persetujuan suatu negara untuk mengikat diri pada suatu perjanjian (*consent to be bound by a treaty*) dapat dilakukan dengan penandatanganan, ratifikasi, pernyataan turut serta (*accession*), atau menerima (*acceptance*) suatu perjanjian. Perjanjian kerjasama yang dibuat Jepang dalam penelitian ini menitik beratkan pada masalah kerjasama keamanan yang akan dibangun dengan Amerika Serikat sebagai negara yang memiliki power untuk memasukan Jepang sebagai payung pertahanan Amerika Serikat.

Negara memiliki fungsi mutlak yang harus dilakukan, yaitu:

1. Melakukan penertiban atau bertindak sebagai stabilisator
2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya
3. Pertahanan, hal ini diperlukan sebagai salah satu cara negara untuk melindungi kemungkinan terjadinya serangan dari luar
4. Menegakkan keadilan

Dalam penelitian yang akan dilakukan negara di gambarkan sebagai subjek yang harus mengambil keputusan dalam menanggulangi masalah keamanan dan pertahanan bagi warganya.

Kepentingan nasional (*national interest*) adalah sebuah tujuan fundamental dan faktor penentu yang mengarahkan negara, dalam hal ini diwakili oleh para pembuat keputusan negara. Kepentingan nasional suatu negara secara khas merupakan unsur-unsur yang membentuk kebutuhan negara paling vital, seperti pertahanan, keamanan, militer, dan kesejahteraan ekonomi. Konsep *national interest* dalam penelitian ini digunakan

untuk menjelaskan bagaimana agar tercapainya kepentingan Amerika untuk dapat mempertahankan kedudukannya di Asia Timur khususnya di Jepang. *National Interest* Amerika Serikat terhadap menjaga kepentingan politik dan ekonominya terhadap negara-negara di kawasan Asia Timur.

Kepentingan nasional yang bersifat vital berkaitan dengan eksistensi negara dalam percaturan politik dunia. Selain itu juga menyangkut kedaulatan dan keutuhan wilayahnya.

Konsep ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana dukungan dari Amerika Serikat dalam menunjang pertahanan militer Jepang, dan kepentingan Jepang untuk mengamankan wilayah teritorialnya.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, Jepang sebagai negara yang dikatakan belum mampu untuk berdiri sendiri di bidang pertahanan maupun militer yang dikarenakan dibatasi oleh konstitusi mengharuskan untuk dapat melindungi kedaulatannya dengan cara tergantung pada kekuatan payung militer Amerika Serikat yang diharapkan dapat membantu Jepang dalam menyelesaikan konflik yang terjadi antara Jepang dengan negara-negara tetangganya.

Selain terbentur konstitusi, masyarakat Jepang yang memiliki traumatis akan dampak peperangan terdahulu selalu menekan pemerintah untuk tidak ikut serta dalam kegiatan militer apapun, karena dikhawatirkan akan mengulang masa kelam yang pernah mereka rasakan pasca perang dunia kedua.

Namun Jepang tetap optimis atas kekuatan militernya saat ini, karena dengan kemampuan teknologi terbaik dan tingkat kekuatan ekonomi yang kuat yang dimiliki Jepang dapat mendorong Jepang sebagai negara yang bisa untuk melindungi negaranya sendiri secara mandiri tanpa harus lagi tergantung dengan negara lain. Hal itu tergambar dari usaha pemimpin Jepang yang ingin merevisi konstitusi yang membatasi kekuatan pertahanan Jepang dan juga mulai ditingkatkannya anggaran militer Jepang.

3. Pembahasan

3.1 Hubungan Jepang-Amerika Serikat di Bidang Pertahanan

Sebelum akhir dari Perang Dunia kedua (PD II) Jepang merupakan salah satu negara yang mempunyai kekuatan militer yang cukup diperhitungkan. Selain memiliki nasionalisme yang tinggi, Jepang juga di dukung dengan kekuatan militer yang maju dengan teknologi yang sudah maju pada zaman itu, membuat rakyat Jepang pun sangat membangga-banggakan kekuatan militer yang mereka miliki.

Namun kenyataan pahit nampaknya harus diterima Jepang setelah dijatuhkannya bom atom oleh Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di Nagasaki sebagai bentuk balasan Amerika Serikat atas penyerangan Jepang terhadap pangkalan angkatan laut Amerika, Pearl Harbour.

Dengan hancurnya kedua kota tersebut membuat Jepang tidak berdaya dan pada akhirnya menyerah tanpa syarat kepada Amerika Serikat pada 14 Agustus 1945. Sebagai negara yang kalah perang dan memiliki nilai tawar yang rendah Jepang diwajibkan tunduk dan patuh terhadap perjanjian yang diajukan oleh sekutu (AS). Ini adalah awal dimana Jepang tidak memiliki kekuatan militer secara aktif, dan tidak lagi dapat mempertahankan kedaulatannya secara

mutlak. Dalam arti Jepang yang menganut sistem militer pasif tidak dapat dengan sendiri atau secara mandiri mempertahankan kedaulatan wilayahnya.

Jepang sangat membatasi langkahnya dalam bidang militer, hal tersebut memumbuat Jepang menjalin hubungan dengan Amerika Serikat sebagai sekutunya untuk ikut serta dalam membantu Jepang mempertahankan kedaulatannya dan juga menjaga Jepang dari situasi tidak stabil di kawasan Asia Timur.

Sebagai bukti bahwa Jepang sangat membatasi pengembangan kekuatan militernya adalah dengan adanya Pasal 9 dalam konstitusi Jepang yang sangat membatasi kekuatan militer yang ada di Jepang. Berikut adalah isi dari Konstitusi Pasal 9 Jepang: (1) Bercita-cita tulus untuk sebuah perdamaian internasional yang didasarkan pada keadilan dan ketertiban, orang-orang Jepang selamanya meninggalkan perang sebagai hak kedaulatan bangsa dan ancaman atau penggunaan kekerasan sebagai sarana penyelesaian perselisihan internasional. (2) Untuk mencapai tujuan paragraf sebelumnya, darat, laut, dan angkatan udara, serta potensi perang lainnya, tidak akan dipertahankan. Hak negara untuk berperang tidak akan diakui.

Amerika Serikat mengambil alih sistem pemerintahan Jepang yang harus tunduk di bawah sistemnya sesuai *Potsdam Declaration* dan Jepang harus mengakui Douglas Mac Arthur sebagai Komandan tertinggi kekuatan sekutu Pasifik, selaku *officer* pendudukan di Jepang. Dan demi keamanan dunia, Sekutu juga melakukan perubahan terhadap konstitusi Jepang yang mengisyaratkan agar Jepang tidak lagi mengembangkan kekuatan militer di kemudian hari

Pada konstitusi tersebut jelas bahwa Jepang tidak akan berpartisipasi dalam segala bentuk kekerasan maupun peperangan, dengan kata lain sebagai negara dengan pasukan militer yang pasif mengharuskan Jepang untuk tergantung pada kekuatan militer yang lebih besar untuk mempertahankan dan mengamankan wilayah dan kedaulatannya dari ancaman yang sekiranya dapat membahayakan Jepang, terlebih lagi kawasan Asia Timur merupakan kawasan yang rawan akan konflik.

Selama Pasal 9 dalam konstitusi tersebut tidak pernah berubah, maka selama itu pula Jepang tidak akan mampu memiliki militer yang dapat mempertahankan kedaulatannya sendiri. Karena konstitusi tersebut dengan jelas membatasi segala macam bentuk kekuatan militer untuk dikembangkan.

Selain konstitusi Pasal 9 tersebut, ketergantungan Jepang terhadap Amerika Serikat terlihat jelas dari teknologi militer yang digunakan untuk membuat pesawat tempur Jepang adalah teknologi yang dipinjamkan atau dilindungi hak ciptanya oleh Amerika Serikat sesuai dengan perjanjian *U.S.-Japan Cooperative Development*. Sehingga bila terjadi sebuah kerusakan, maka yang berhak untuk memperbaiki dan memperbaharui adalah teknisi dari Amerika Serikat, sedangkan pihak Jepang tidak boleh sama sekali memperbaiki, meniru, membuat teknologi militer untuk dirinya sendiri tanpa adanya persetujuan dari Amerika Serikat, walaupun Jepang memiliki teknologi untuk membuat dan mengembangkan teknologi militernya sendiri.

Bukti lain dari ketergantungan Jepang terhadap Amerika Serikat adalah, Amerika Serikat selalu menjadi penentu dari langkah Jepang untuk menentukan

kebijakan bagi pertahanan dan keamanan Jepang. Sebagai negara yang berdaulat seharusnya Jepang dapat menentukan kebijakannya sendiri tanpa adanya campur tangan negara lain. Sesuai dengan *Japan-US Security Treaty* pasal tiga dijelaskan bahwa kedua negara harus bergotong-royong dalam mempertahankan dan mengembangkan pertahanan, dan tunduk pada ketentuan konstitusional mereka. Sesuai dengan konstitusi Jepang yang melarang Jepang untuk ikut serta dalam kekuatan militer, mengharuskan Jepang untuk tergantung pada payung pertahanan Amerika Serikat sehingga kebijakan ini merupakan identitas politik Jepang menghadapi perkembangan regional maupun global.

Kemudian Jepang pun diharuskan untuk memberikan penggunaan wilayah darat, laut, dan udaranya untuk militer Amerika Serikat sebagai kontribusi Jepang dalam memelihara keamanan dan kestabilan perdamaian Jepang maupun Asia Timur sesuai dengan *Japan-United State (US) Security Treaty*.

Sebagai bukti bahwa Jepang mempersilahkan Amerika Serikat untuk menggunakan wilayah darat, udara dan lautnya adalah dengan di bangunnya beberapa pangkalan militer Amerika Serikat di wilayah Jepang dengan tujuan untuk memberi garansi rasa aman kepada Jepang sesuai dengan *Japan-US Security Treaty* yang diperbaharui pada tahun 2011. Sesuai dengan Pasal 6 pada perjanjian tersebut tertulis bahwa Jepang menyiapkan segala keperluan yang diperlukan Amerika Serikat untuk mempertahankan keamanan Jepang, dan Amerika Serikat akan menyediakan perlengkapan-perlengkapan dan alat-alat yang dibutuhkan Jepang.

Sebagai contoh bahwa Amerika serikat sangat berperan dan bisa dibilang menguasai sebagian besar sistem pertahanan Jepang dapat terlihat dari Okinawa, salah satu prefektur di Jepang. Okinawa yang menjadi pusat pangkalan militer Amerika Serikat ini hampir sebanyak 75% wilayah yang dipenuhi oleh enam lingkungan masyarakat, yaitu: 82,8% di Kota Kadena, 59,8% di Kota Kin, 56,4% di Kota Chatan, 51,5% di Kota Ginoza, 46,9% di Kota Yomitan, dan 41,5% di Desa Higashi dikuasai oleh Amerika Serikat. Selain itu Amerika Serikat juga mengontrol 29 wilayah lautan dan 15 wilayah udara di Okinawa. Dua dari tiga bandar udara dijalankan oleh Amerika Serikat.

Dikala seluruh wilayah Jepang lainnya menikmati pertumbuhan ekonomi yang cepat, masyarakat di Okinawa justru merasakan hal yang sebaliknya, karena posisi Okinawa yang bisa dikatakan dikontrol pada dua struktur yaitu struktur Jepang dan struktur Amerika Serikat yang dikenal sebagai struktur *Triangle*. Dan kemudian struktur ini yang kemudian membuat struktur dependensi antara Okinawa dan Jepang, serta mempengaruhi kehidupan politik dan ekonomi di Okinawa yang dikontrol oleh Jepang yang berpihak pada keberadaan basis militer Amerika Serikat disana.

Dari sistem dependensi tersebutlah maka perekonomian Okinawa sangat tergantung pada aktifitas basis-basis militer Amerika Serikat disana. Karena sebanyak 40.000 masyarakat Okinawa bekerja di dalam basis-basis militer AS. Hal ini dipilih karena bekerja di basis-basis tersebut lebih menjanjikan daripada pekerjaan lain di Okinawa. Pendapatan perbulan yang didapatkan dari bekerja di basis militer Amerika Serikat sebesar 311.000 Yen dibandingkan hanya menjadi *Tour Guide* ataupun operator telepon dan

pekerjaan lainnya sebesar 298.800 Yen dan bisa kurang dari itu.

Kemudian masalah kontrol udara di Okinawa juga merupakan salah satu yang dikuasai Amerika Serikat. Setiap pesawat yang akan terbang ataupun mendarat di Okinawa haruslah mendapatkan persetujuan dari pihak pangkalan udara Amerika Serikat. Tidak hanya yang melalui pangkalan udara AS, namun semua penerbangan komersialpun harus mendapat persetujuan dari sana. Dan juga penerbangan AS harus diutamakan dibandingkan penerbangan lokal. Jika ada pesawat lokal yang akan terbang bersamaan dengan pesawat milik AS, maka yang diprioritaskan adalah pesawat AS terlebih dahulu. Semua fakta yang ada menunjukkan seberapa besar ketergantungan yang terjadi antara Jepang dengan Amerika Serikat sehingga Jepang bisa membagi kekuasaan wilayahnya yang bisa dikatakan sebagai halaman belakang bagi Jepang dengan negara lain, sehingga akan terlihat bahwa Okinawa merupakan bagian Jepang tetapi sangat tergantung pada kebijakan dari Amerika Serikat.

Selain itu kekuatan militer Jepang walaupun memiliki teknologi yang tidak kalah canggih dengan militer yang dimiliki negara-negara tetangganya tetapi dirasa tertinggal apabila Jepang sejak kekalahannya pada Perang Dunia ke II tidak lagi mengembangkan kekuatan militernya. Memang Jepang merupakan salah satu negara yang memiliki kekuatan ekonomi besar, tetapi hal tersebut tidak diikuti dengan perkembangan kekuatan militernya.

Oleh sebab itu untuk mengejar ketertinggalannya dari negara-negara tetangganya seperti Cina dan Korea Utara yang telah lebih dulu mengembangkan dan juga memperkuat pasukan militernya dari tahun ke tahun dirasa berat untuk Jepang sebagai negara yang pasif militer. Untuk itu satu-satunya jalan keluar untuk menstabilkan kekuatan pertahanannya Jepang harus selalu ketergantungan dengan Amerika Serikat sebagai negara yang memiliki kekuatan militer besar.

3.2 Penentangan Rakyat Jepang Terhadap Pembangunan Kembali Militer Jepang

Jepang harus menerima kenyataan bahwa Jepang adalah satu-satunya negara di dunia yang di jatuhi bom atom sampai dua kali. Hal tersebut selain menimbulkan kerusakan yang parah, kehancuran di segala sektor, penyakit yang timbul pasca bom atom, tetapi juga meninggalkan trauma psikis yang sangat mendalam bagi masyarakat Jepang sampai saat ini.

Rakyat Jepang yang dulu berfikir bahwa Jepang sebagai negara yang kuat yang memiliki militer tangguh yang dapat membawa Jepang kepada kemakmuran dan perdamaian nyatanya harus menderita akibat kekalahan telak Jepang pada Perang Dunia II. Untuk itu sampai saat ini rakyat Jepang selalu menolak Jepang untuk ikut serta dalam segala bentuk peperangan maupun memperkuat kekuatan militernya, dengan alasan rakyat Jepang takut akan terulang kekelaman masa lalu jika Jepang memperkuat pasukan militernya.

Beberapa wacana pemerintah Jepang untuk mengubah konstitusi Pasal 9 pun selalu mendapat tanggapan yang tidak baik dari masyarakat Jepang. Banyak yang melakukan aksi demo secara besar-besaran bahkan sampai sebanyak puluhan ribu masyarakat Jepang sebagai bukti bahwa mereka menolak dengan keras keinginan pemerintah Jepang untuk mengubah Pasal 9 dari konstitusi Jepang.

Selain berdemo, bukti penolakan lainnya yang dilakukan oleh seorang warga negara Jepang adalah dengan cara membakar dirinya sendiri karena tidak setuju untuk perubahan konstitusi tersebut. Selain itu pembakaran diri lainnya dilakukan karena hanya dengan mendukung tindakan Amerika tersebut bertentangan dengan konstitusi Jepang yang menolak keikutsertaan Jepang dari segala macam bentuk peperangan.

Penolakan masyarakat Jepang atas pembentukan kembali kekuatan militernya selain dikarenakan rasa trauma yang sampai detik ini masih menghantui mereka, tetapi juga sangat bersebrangan dengan Konstitusi Pasal 9 Jepang yang melambangikan bahwa Jepang adalah negara yang cinta damai, jauh dari peperangan dan kekerasan yang membawa Jepang terdahulu menjadi negara yang hancur dsan menyisakan banyak kepedihan bagi rakyatnya, maka sangat beralasan bahwa rakyat Jepang menentang segala bentuk keikut sertaan Jepang dalam peperangan maupun pembentukan militernya kembali.

Sesuai kepentingan nasional nya, Jepang pun hanya memfokuskan dengan bidang ekonomi dimana bidang pertahanan sudah ditangani oleh Amerika Serikat dan Jepang harus mengakui Douglas MacArthur sebagai komandan tertinggi dan selaku *officer* pendudukan di Jepang. Jadi masyarakat Jepang berfikir Jepang tidak harus lagi terlibat dalam segala jenis peperangan karena Amerika Serikat sudah menjamin keamanan dan pertahanan untuk kedaulatan Jepang.

Rakyat Jepang berfikir seharusnya memang negaranya tidak lagi ikut serta dalam kegiatan militer yang ada, karena keamanan dan pertahanan bagi Jepang sudah di jamin oleh Amerika Serikat sebagai sekutu Jepang. Jadi tindakan untuk memperbaharui pasal 9, tindakan memperkuat kembali kekuatan militer Jepang, dan kegiatan militer lainnya menjadi sebuah topik yang sangat sensitif bagi rakyat Jepang.

3.3 Perkembangan Pertahanan Militer Jepang di Masa Yang Akan Datang

Jepang masa sekarang bisa dikatakan mengalami situasi yang sangat dilematis, dimana banyaknya tekanan yang dirasakan dari dalam maupun dari dunia Internasional. dunia Internasional mengharapkan agar Jepang mampu mandiri untuki membangun militernya sendiri, karena selama ini bantuan Jepang hanya dari segi finansial dirasa tidak cukup dan tidak adil dalam upaya negara-negara untuk menjaga keamanan internasional. jepang dituntut lebih berpartisipasi sepenuhnya baik secara finansial maupun secara militer.

Desakan dari dalam negeri pun tidak kalah hebatnya, namun kondisinya terbalik dimana mayoritas masyarakat Jepang menolak untuk kembalinya Jepang membangun kekuatan militernya, karena dengan alasan bersebrangan dengan konstitusi Jepang dan juga pukulan traumatis dari kisah kelam masa lalu yang dilewati Jepang pasca kekalahannya pada Perang Dunia II. Hal ini membuat Jepang di posisi yang dilema, antara membangun kembali kekuatan militernya atau tidak. Jika memutuskan untuk kembali membangun kekuatan militer tentunya desakan dari dalam negeri akan membuat situasi di dalam negeri tidak kondusif karena adanya penolakan. Sedangkan bila tidak membangun kembali kekuatan militernya maka desakan dari dunia

internasional pun akan menganggap Jepang hanya sebagai negara yang tidak ikut berpartisipasi dalam menjaga perdamaian dunia.

Dari segala permasalahan yang ada, Jepang memiliki sebuah strategi yang dianggap akan menguntungkan bagi Jepang di masa yang akan datang. Jepang memanfaatkan kondisi dimana seakan-akan pembangunan militer yang dilakukan Jepang merupakan suatu keharusan yang dipaksakan dari kondisi di luar Jepang ataupun situasi di sekitar Jepang.

Strategi ini dinilai sebagai salah satu strategi cerdas karena pembangunan kekuatan militer yang dilakukannya mendapat pembenaran dari dalam dan luar negeri karena akan terlihat bahwa pembangunan yang dilakukan Jepang merupakan desakan yang dirasakan Jepang dari kondisi sekitarnya yang mengharuskan Jepang untuk memperkuat pertahanannya.

Sebenarnya peningkatan kekuatan militer Jepang sudah terlihat dari beberapa tahun sebelumnya, walaupun masih berupa JSDF (*Japan Self Defense Force*) tetapi Jepang selalu cerdik untuk dapat menambah jumlah kekuatan milkiternya melalui situasi-situasi yang mengharuskan Jepang menambah jumlah pasukannya atas permintaan Amerika Serikat guna menunjukan keseriusan Jepang untuk mendukung Amerika Serikat yang merupakan sekutunya sebagai polisi dunia internasional. tentu saja hal seperti ini sangat menguntungkan Jepang melihat kondisi Jepang yang tidak akan mungkin secara terang-terangan untuk menambah ataupun memperkuat kekuatan militernya.

Dalam sistem pertahanan baru tersebut Jepang mengembangkan kemampuan untuk *counter cyber-attack* dan mengamankan teknologi informasi serta jaringan internasional. kemudian mengembangkan pertahanan anti nuklir, serangan kimia dan biologi, serta membuat pertahanan untuk serangan tidak terduga. Dana yang diterima kabinet Jepang untuk melaksanakan MTDP tersebut sejak 5 Desember 2000 sampai tahun 2005 adalah sebesar 25 triliun Yen.

Disini mulai tergambar bagaimana cara Jepang untuk menambah dan memperkuat pertahanan militernya dengan memanfaatkan situasi yang ada. Selain berhasil menambah jumlah personil militernya, Jepang juga telah memperbaharui sistem pertahanannya sedikit lebih moderen. Pembaharuan yang sangat terlihat perubahannya secara signifikan terlihat dari segi persenjataan dan peralatan pertahanan dan keamanan Jepang seperti lima area angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, *IT Network, Research and Development.* Dalam program ini disebutkan tentang kerjasama dengan Amerika Serikat dalam *research and development* di bidang pengembangan *theater missile defense, Fixed wing maritime patrol/ ASW P-3C dan C-1 transport replacement*, pembangunan *defense information infrasructure (triservice computer integration program, dan Common operating environment*. Moderenisasi ini menyebabkan Jepang memiliki kekuatan misil yang canggih serta akan sangat unggul dalam peningkatan kinerja persenjataan dan peralatan militer.

Dengan adanya pembaharuan sistem seperti tentu saja dapat memberikan keuntungan bagi Jepang, selain menjadi lebih efektif lagi dari segi militer dengan kemampuan dan teknologi yang lebih maju untuk sistem pertahanan dan keamanan dibandingkan harus merekrut banyak pasukan. dan ini merupakan langkah awal

dimana Jepang dapat mengembangkan sistem pertahanannya ke taraf untuk mandiri secara perlahan.

Kemudian situasi lain yang dimanfaatkan Jepang adalah dengan basis fokus utama Jepang yang hanya tertuju pada sektor ekonomi, maka Jepang memanfaatkan pembangunan industri besar alat otomotif dan teknologi yang nantinya dapat memproduksi alat-alat perang yang canggih dengan kamuflase Jepang mengembangkan dan membangun industri tersebut hanya sebagai salah satu cara memperoleh keuntungan ekonomi. Padahal nyatanya Jepang yang dikenal sebagai negara pasifis ini adalah negara yang menempati ukuran ketiga untuk negara pengekspor senjata (di kawasan Asia-Pasifik) dengan total jumlah keuntungan ratusan juta dollar.

Faktor lain yang menunjukkan peningkatan kekuatan militer Jepang adalah dengan ditandainya beberapa kali mengadakan amandemen untuk pasal 9 di konstitusinya, walaupun hal itu mendapat tanggapan pro dan kontra dari masyarakat dalam negerinya. Karena Jepang menginginkan kemandirian secara pertahanan dan militer. Walaupun secara konvensional Jepang memiliki militer yang pasifis namun anggaran militer Jepang menempati posisi terbesar ke lima di dunia, dan juga militernya dibekali dengan teknologi yang mutakhir.

Perubahan dari lingkungan Jepang yang membuat Jepang selalu meningkatkan teknologi dan juga anggaran militernya. Dengan bertambahnya jumlah anggaran militer Cina setiap tahun ke tahun yang membuat Jepang kemudian merasakan itu sebagai ancaman jika mengingat masalah historis dan juga masalah sengketa maritim. Selain itu ulah yang selalu dibuat oleh Korea Utara dengan selalu memperbaharui teknologi rudal-rudalnya dan juga kekuatan nuklir nya yang kemudian mengharuskan Jepang selalu menambah dan memperbaharui segala sistem pertahanan negaranya.

Hal ini didukung dengan ditambahnya anggaran militer Jepang sebesar 49 miliar dollar AS pada tahun 2014, dimana penambahan anggaran militer tersebut dianikan menjadi 3% dari GDP nya. Hal ini tentulah langkah awal Jepang untuk memperkuat militernya dasn merupakan anggaran militer terbesar sejak tahun 1992, dan merupakan titik balik karena semenjak tahun 2002 anggaran militer Jepang selalu mengalami penurunan sampai tahun 2012. Walupun begitu tetap saja peningkatan anggaran militer Jepang tersebut tidak sebanding dengan peningkatan anggaran militer Cina yang mencapai 166 miliar dollar AS atau tiga kali lebih besar dari anggaran militer Jepang.

Tetapi bagi Jepang dengan anggaran yang ada sudah mampu memperkuat pertahanan Jepang maupun sebagai anggaran untuk menjaga kepulauan yang di sengketakan dengan Cina maupun untuk meperbaharui segala teknologi perang yang ada. Karena pertahanan yang baik adalah teknik menyerang yang kuat.

Selain itu Jepang pun mendapat dukungan dari beberapa negara seperti Australia, Singapura dan Filipina untuk memperkuat militernya. Karena bagi beberapa negara di kawasan Jepang memiliki peran sentral yang strategis untuk mengimbangi kekuatan Cina. Bagi Amerika serikat pun Jepang sangat berpengaruh dalam langkah *Pacific Pivot* Amerika Serikat. Perluasan peran dan peningkatan jumlah militer Jepang ini pun didukung oleh Amerika Serikat karena

akan mengurangi beban Amerika Serikat dalam menjaga stabilitas kawasan ditengah keterbatasan anggarannya.

4. Kesimpulan dan Saran

Hubungan Jepang dalam bidang pertahanannya terhadap Amerika Serikat merupakan dampak dari kekalahan Jepang pasca Perang Dunia II. Dimana Jepang diharuskan mengembalikan semua wilayah jajahannya, dan juga melucuti semua kekuatan militernya. Hal ini merupakan awal dari Jepang sebagai negara yang tidak memiliki kekuatan militer untuk mempertahankan kedaulatannya. Situasi ini tentunya sangat merugikan bagi Jepang, karena Jepang berada di kawasan Asia Timur yang tidak pernah lepas dari konflik kawasan.

Selain konflik kawasan, aspek saling mencurigai dari setiap negara di kawasan Asia Timur mendorong setiap negaranya untuk terus memperkuat kekuatan militernya dengan selalu memperbaharui dan mengembangkan peralatan militernya, kemudian setiap negara pun berlomba lomba untuk menambah jumlah anggaran militernya untuk selalu memperkuat militer masing-masing negara. hal ini tentu saja berbanding terbalik dengan Jepang yang mengadopsi sistem pasif militer yang mengharuskannya tidak boleh mengembangkan militernya.

Masalah lain yang sangat meresahkan adalah Cina dan Korea Utara adalah negara-negara yang secara historis memiliki konflik dengan Jepang hingga saat ini. Dengan Cina yang selalu menambah anggaran militernya dan juga selalu memperbaharui sistem pertahanan dan peralatan militernya serta Korea Utara yang selalu melakukan uji coba nuklir dan mengembangkan kekuatan nuklir menjadi suatu ancaman tersendiri bagi Jepang.

Konflik sengketa maritim pun menambah panas hubungan Jepang dengan Cina. Hal ini selalu menjadi konflik yang tidak bisa dihindari di kawasan Asia Timur. Setiap negara keras pada pendiriannya masing-masing bahwa kepulauan yang disengketakan adalah milik mereka sendiri. Tentu saja Jepang tidak hanya tinggal diam merespon kejadian ini. Cina yang selalu berpatroli di sekitar pulau yang bersengketa membuat Jepang geram.

Dari segala konflik yang ada di kawasan Asia Timur yang mengancam Jepang, Jepang menyadari kekurangannya untuk dapat mempertahankan kedaulatannya tidak bisa dicapai dengan situasi yang terbatas dari konstitusinya sendiri yang mengisyaratkan bahwa Jepang sebagai negara yang cinta damai, dan pasif secara militer membuat Jepang mengalami dilema. Di satu sisi Jepang yang ingin mandiri tetapi akan menghadapi tekanan yang kuat dari dalam negeri karena bersebrangan dengan konstitusi. Tetapi jika tidak mengembangkan dan memperkuat kekuatan militernya secara mandiri, Jepang akan menjadi sasaran empuk bagi rivalnya di kawasan setiap saat atau kapanpun.

Langkah yang diambil Jepang guna mempertahankan kedaulatannya berdasarkan kepentingan nasionalnya dan juga berdasarkan asas pasifis adalah dengan cara meminimalisir dan menyelesaikan konflik yang sudah terjadi ataupun yang akan menjadi konflik dengan sangat cermat. Karena apabila Jepang tidak mampu mengelola permasalahan yang ada

dengan kurang cermat maka akan mempersulit Jepang kedepannya.

Untuk menutupi kekurangan itu Jepang bekerjasama dengan Amerika Serikat untuk ikut serta menstabilkan kedaulatan Jepang dengan catatan Jepang bersedia menyiapkan kebutuhan logistik dan juga tempat untuk kekuatan militer Amerika Serikat yang menjaga pertahanan Jepang. Sebagai gantinya Amerika Serikat akan menyiapkan peralatan untuk menjaga kawasan Jepang yang segala sesuatunya telah diatur dalam *Treaty of Mutual Cooperation and Security between Japan and the United States of America.*

Sesuai perkembangan zaman, Jepang pun mampu mengimbangi keperluan militernya dengan strategi yang cerdas untuk memperkuat angkatan militernya. Hal itu dicerminkan dari cara Jepang yang terus menambah dan memperbaharui setiap angkatan militernya dengan cara yang seolah-olah mendapatkan pembenaran karena desakan situasi yang mengancam Jepang. Faktanya sekarang Jepang memiliki kekuatan militer yang mungkin secara konvensional hanya berjumlah tidak terlalu banyak namun memiliki anggaran militer terbesar ke lima di dunia.

Selain itu Jepang pun menjadi negara terbesar ke tiga sebagai pengekspor persenjataan militer. Walaupun terlihat tidak sesuai dengan konstitusi yang tidak memperbolehkan Jepang untuk memproduksi peralatan perang, tetapi masalah ini disiasati Jepang dengan perspektif ekonomi yang hanya menginginkan keuntungan ekonomi saja dari hasil penjualan peralatan militer tersebut.

Jepang pun mendapat dukungan dari beberapa negara untuk terus memperkuat militernya dengan alasan Jepang yang mampu menyeimbangi kekuatan Cina di kawasan Asia Timur. Langkah ini juga mendapat dukungan dari Amerika Serikat. Bagi Amerika Serikat dengan menguatnya kekuatan militer Jepang akan mengurangi beban Amerika Serikat untuk menjaga kestabilan kawasan Asia-Pasifik.

Karena pada dasarnya negara yang berdaulat haruslah memiliki kekuatan militer mandiri yang mampu mempertahankan dan menjaga kepentingan maupun kemanan serta pertahanan negaranya sendiri. Namun yang dihadapi Jepang sangatlah berbeda, selama Jepang masih berpegang pada konstitusi Pasal 9 yang mereka anut, selama itu pula Jepang tidak akan mampu mandiri secara pertahanan.

Daftar Pustaka

Dirgantara, Igor. 2010. Orientasi Pertahanan Jepang. https://oseafas.wordpress.com/2010/03/16/sistem-pertahanan-jepang-di-asia-tenggara/ [15/5/2015]

Hendrajit. 2012. Cermati Tiga Kekuatan Baru di Asia Pasifik. Melalui. http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=8080&type=99#.VdMT7bVNr3k [10/8/2015]

Irsan, Abdul. *Budaya dan Perilaku Politik Jepang di Asia.* 2007. Purwokerto: Grafindo Khazanah.

Mauna, Boer. *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global.* 2005. Bandung: Alumni

Perwita, Anak Agung Banyu dan Yanyan Mochamad. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional.* 2005. Bandung: Rosdakarya

Rudy, T. May. Komunikasi Dan Hubungan Masyarakat Internasional. 2005. Bandung: Refika Aditama.

Sitepu, P.Anthonius. *Studi Hubungan Internasional*. 2011. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Thesis. 2007. Ketergantungan Militer Jepang terhadap Amerika. http://thesis.umy.ac.id/datapublik/t9664.pdf [5/5/2015]

Yuzuru, Shimada. 2011. UUD Jepang dan Tata Negara. Melalui http://www2.gsid.nagoyau.ac.jp/blog/shimadayuzuru/files/2011/03/paper_for_lecture_at_unand_on20110225.pdf [12/2/2015]